



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 24 (dua puluh empat)

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum

Dengan : Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Selasa, 11 Maret 2025

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai
Pelayanan JKN di fasilitas kesehatan

Ketua Rapat : M. Yahya Zaini, S.H./Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi
IX DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI
34 Anggota Komisi IX DPR RI

B. Stakeholder

- Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI); drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., MH., beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

- Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dilaksanakan berdasarkan Surat Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Nomor 052/PP.ARSSI/B/II/2025, tanggal 22 Januari 2025, perihal Permohonan Audiensi mengenai Pelayanan JKN di fasilitas kesehatan.
- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dibuka pukul 14.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

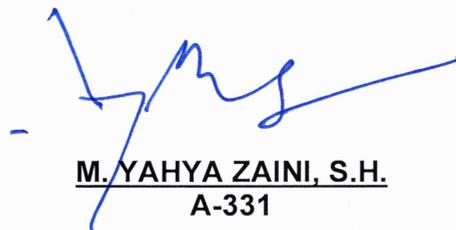
1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI).
2. Masukan yang disampaikan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI) akan menjadi bahan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja.
3. Masukan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI) yang disampaikan sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.12 WIB.

Jakarta, 11 Maret 2025

KETUA RAPAT,



M. YAHYA ZAINI, S.H.
A-331

**CATATAN AUDIENSI
KOMISI IX DPR RI DENGAN
ASOSIASI RUMAH SAKIT SWASTA INDONESIA (ARSSI)
SELASA, 11 MARET 2025**

1. Pendahuluan

- 69,7% dari total 2.243 rumah sakit di Indonesia adalah rumah sakit swasta, lebih dari 2000 RS swasta sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- RS Swasta berperan besar dalam kelancaran Program JKN, menyediakan akses yang lebih luas dan meningkatkan kualitas layanan medis.
- Namun, RS Swasta menghadapi tantangan dalam mendukung Program JKN yang membutuhkan solusi bersama.

2. Problematika JKN bagi Rumah Sakit Swasta

- **Regulasi Cepat Berubah:**
Banyak regulasi baru dalam tiga tahun terakhir yang mengubah cara operasional rumah sakit. Ketidakjelasan masa transisi untuk adaptasi regulasi menyulitkan rumah sakit.
- **Tarif INA-CBG Tidak Sesuai Biaya Operasional RS:**
Tarif INA-CBG belum mengalami kenaikan dalam tiga tahun, sementara biaya operasional RS terus meningkat (inflasi, UMK, pajak, dll). Hal ini mempengaruhi kualitas layanan medis di RS Swasta.
- **Pending dan Verifikasi Klaim:**
Klaim yang sudah sesuai administrasi dan klinis tetap sering tertunda atau ditolak tanpa alasan yang jelas, menghambat cash flow RS.
- **Pembatasan Layanan dan Pemutusan Kerjasama:**
Beberapa RS dibatasi dalam membuka layanan tertentu dan pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa kejelasan, yang mempengaruhi operasional RS.

3. Rekomendasi ARSSI

1. Melibatkan RS Swasta dalam pembentukan kebijakan dengan stakeholder untuk membangun komunikasi yang efektif.
2. Menyediakan masa transisi yang lebih lama (6-12 bulan) sebelum implementasi regulasi baru.

3. Evaluasi dan revisi tarif INA-CBG sesuai dengan aturan yang berlaku setiap dua tahun.
4. Peninjauan Perpres No. 59/2024 terkait KRIS dan penyesuaian tarif serta juknis pelaksanaannya.
5. Meningkatkan transparansi dalam proses verifikasi klaim BPJS Kesehatan dan penyelesaian sengketa.
6. Mengembangkan koordinasi manfaat (COB) dengan asuransi swasta agar pasien memiliki pilihan layanan yang lebih luas.
7. Memudahkan pengembangan dan kerja sama antara RS Swasta dan BPJS Kesehatan untuk akses pelayanan yang lebih terjangkau.

4. Kesimpulan

- ARSSI menyampaikan solusi konkret untuk mendukung keberlanjutan Program JKN dan memastikan peserta mendapatkan layanan optimal.
- Kolaborasi antara RS Swasta, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes sangat diperlukan untuk keberhasilan sistem JKN yang berkelanjutan

5. TANGGAPAN KOMISI IX DPR RI

Komisi IX DPR RI berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh **Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI)** dan akan menjadi bahan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra